

Donald Trump Dilantik Jadi Presiden AS, PM Prancis Ketar Ketir: Uni Eropa Bisa Hancur

Category: Internasional, News

written by Redaksi | 21/01/2025



ORINews.id – Donald Trump kembali dilantik menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Orang nomor wahid di Amerika itu menjadi perhatian banyak negara karena kontroversinya seperti hendak mencaplok Greenland dan Kanada. Juga akan meningkatkan tarif dan berbagai kontribusi negara untuk meningkatkan pendapatan Amerika.

Rencana Trump yang demikian membuat sejumlah petinggi negara ketar ketir. Perdana Menteri (PM) Prancis Francois Bayrou salah satunya. Dia mengatakan, Prancis dan Uni Eropa akan “hancur” jika kebijakan Donald Trump berjalan.

“Amerika Serikat memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang sangat dominan melalui dolar, melalui kebijakan industri, dan melalui penyitaan semua penelitian dan investasi,” tambah Bayrou. Ia menambahkan: “Jika kita tidak berbuat apa-apa, kita akan didominasi, dihancurkan dan dipinggirkan... Terserah pada kita, Prancis dan Eropa, harus mengambil kembali kendali,” sebagaimana diberitakan *AFP*.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot sudah mewanti-

wanti bahwa “jika kepentingan kami dirugikan, kami akan memberikan respons.” Menurutnya, kehadiran Donald Trump memimpin Amerika Serikat menandakan badai bagi perdagangan dan hubungan diplomatik Washington dan Uni Eropa.

Barrow mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Ouest France: “Siapa yang berkepentingan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan Eropa? Amerika mempunyai defisit perdagangan dengan kita, namun justru sebaliknya dalam hal investasi. “Banyak kepentingan dan perusahaan Amerika berlokasi di Eropa.”

Trump, yang kembali menjadi penghuni Gedung Putih telah mengancam Eropa dengan mengenakan tarif yang sangat ketat. Secara khusus, ia memperkirakan Uni Eropa akan membeli lebih banyak minyak dan gas Amerika, dan mengurangi surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat.

Pengamanan

Pengamanan luar biasa digelar menjelang pelantikan kedua Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1). Pelantikan itu menandai kembalinya Trump ke Gedung Putih setelah absen selama empat tahun.

Penyesuaian keamanan itu dilakukan menyusul kekhawatiran yang meningkat menyusul dua kali peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Trump, serangan yang terinspirasi terorisme di New Orleans, dan ledakan di Las Vegas.

Pelantikan kali ini dipindahkan ke Rotunda Capitol karena kekhawatiran cuaca sehingga menjadikannya upacara pelantikan pertama yang diadakan di dalam ruangan sejak 1985.

Hal itu mengharuskan penyesuaian cepat terhadap protokol keamanan yang ada, dengan badan-badan penegak hukum bekerja untuk memastikan keselamatan presiden terpilih dan para tamu.

Dinas Rahasia AS memimpin koordinasi sumber daya federal,

negara bagian, dan lokal di bawah Presidential Decision Directive 62 dan Presidential Threat Protection Act of 2000, bekerja sama erat dengan berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan pengamanan menyeluruh.

Wali Kota Washington D.C. Muriel Bowser mengatakan lembaga keselamatan publik telah menghabiskan hampir satu tahun untuk menyusun rencana keamanan komprehensif bersama mitra federal.

Pengerahan 25.000 personel keamanan

Acara pelantikan itu ditetapkan sebagai National Special Security Event (NSSE), dengan perimeter keamanan terluas yang pernah dibuat dalam sejarah pelantikan, dengan pemasangan pagar sepanjang 48 kilometer mengelilingi gedung Capitol.

Sekitar 25.000 personel keamanan, termasuk 7.800 anggota Garda Nasional dan 4.000 petugas Departemen Kepolisian Metropolitan, dikerahkan untuk mengamankan acara yang diperkirakan akan dihadiri oleh 250.000 tamu dengan undangan resmi.

Bagian signifikan dari pusat kota Washington D.C., mencakup sekitar tiga kilometer dari Gedung Putih ke Capitol, ditutup untuk lalu lintas kendaraan umum.

Pemeriksaan keamanan ketat dilakukan di sejumlah pos pemeriksaan bagi para tamu yang hadir.

Polisi Capitol AS melarang keras barang-barang seperti senjata api, bahan peledak, pisau, dan pesawat nirawak (drone) di area Capitol.

Beberapa stasiun metro akan tetap ditutup sepanjang hari sebagai bagian dari langkah pengamanan, sementara yang lainnya beroperasi dengan pengawasan ketat.

Transportasi umum mulai dibuka pukul 4.00 pagi waktu setempat (09.00 GMT) dengan ratusan personel keamanan memantau sistem transportasi tersebut.

Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memberlakukan zona larangan terbang dengan radius 30 mil laut (55,5 kilometer) dari ibu kota, termasuk larangan penggunaan drone.

Pengawasan udara dilakukan oleh sejumlah helikopter badan penegak hukum AS sepanjang acara berlangsung.

Penjaga Pantai AS juga meningkatkan keamanan maritim secara signifikan dengan mengerahkan lebih dari 300 personel dari Coast Guard Sector Maryland-National Capital Region serta unit lainnya secara nasional untuk memantau dan mengamankan jalur air.

Operasi keamanan komprehensif ini menjadi salah satu upaya penegakan hukum terkoordinasi terbesar dalam sejarah modern AS. Realitas ini mencerminkan ketegangan dan tantangan keamanan yang meningkat di sekitar acara tersebut.[]